

SUMBER DAYA DAN PERMASALAHAN SOSIAL DI DAERAH TERTINGGAL: KASUS DESA PATOAMEME, KABUPATEN BOALEMO

RESOURCES AND SOCIAL PROBLEMS IN LESS DEVELOPED AREA: CASE STUDY IN PATOAMEME VILLAGE, BOALEMO REGENCY

Ruaida Murni

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Jalan Dewi Sartika Nomor 200 Cawang III Jakarta Timur
E-mail: ruaidamurni@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan sosial di Desa Patoameme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dengan analisa menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Data diperoleh dengan cara observasi, studi dokumentasi, wawancara mendalam dan kelompok diskusi terfokus. Informan penelitian terdiri dari tokoh masyarakat dan petugas lapangan. Penulisan dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh berupa sumber daya dan permasalahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, manusia dan sosial yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Adapun permasalahan sosial yang dominan adalah kemiskinan dengan turunannya, yaitu balita telantar, anak telantar dan lanjut usia telantar. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada sumberdaya alam lokal dalam rangka pengurangan kemiskinan.

Kata Kunci: sumber daya, permasalahan sosial, daerah tertinggal.

Abstract

This study has aimed to identify various resources that can be utilized for community development and social problems in the village Patoameme. This research using inductive methodology with qualitative analysis for knowing the real condition. Collecting data through observation, documentation study, in-depth interview and focus group discussion. Informations collected through by some informants those are community's leader and field study officers. This writing using description about resources and sosial problems. The results show that in the study has been found various types of natural resources, human and social. Those are not been managed optimally. The main social problem is poverty with its derivatives, such as children abandoned, neglected children and elderly abandoned. Based on the research results, it is recommended how to set up a kind of community empowerment that based on local natural resources in the context of poverty reduction.

Keywords: resources, social problems, disadvantaged areas.

PENDAHULUAN

Usaha dalam mengatasi ketertinggalan yang dialami oleh sebuah daerah dalam era sekarang adalah dengan melakukan pemekaran wilayah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah karena beberapa alasan yang mengarah pada ketidak terjangkauan daerah tersebut

yang terasa jauh dari pusat pemerintahan, sehingga menyebabkan kurangnya sentuhan pembangunan di suatu daerah yang pada akhirnya akan tertinggal dari daerah lainnya. Tetapi pada hakekatnya ketertinggalan suatu daerah tidaklah hanya bisa teratasi oleh adanya kemudahan akses suatu daerah ke pusat

pemerintahan, atau dalam kata lain adalah dengan melakukan pemekaran wilayah.

Sumber daya yang tersedia di suatu daerah bisa jadi terpengaruh oleh adanya pemekaran wilayah. Misalnya saja sumber daya manusia yang produktif yang tadinya ada dalam satu wilayah menjadi tersebar dalam dua wilayah yang berbeda antara induk wilayah dan pemekarannya. Keadaannya bisa jadi sumber daya terkonsentrasi di induk wilayah, atau di wilayah pemekaran. Tetapi pada era otonomi wilayah ini, masing-masing wilayah baik induk atau pemekarannya adalah sebuah wilayah sendiri dan tentunya terkonsentrasi pada wilayahnya sendiri, sehingga tidak akan terjadi suatu proses subsidi silang antar wilayah.

Kondisi tersebut terjadi di Desa Patoameme Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Terbatasnya sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya, dan belum didayagunakannya sumber daya sosial, menyebabkan Kabupaten Boalemo dikategorikan daerah tertinggal. Terbatasnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya tersebut menyebabkan angka kemiskinan di Desa Patoameme cukup signifikan. Permasalahan kemiskinan tersebut melahirkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lain, yaitu Balita terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar. Pada RPJMN II, pembangunan daerah tertinggal merupakan salah prioritas nasional. Hal ini di dasarkan pada hasil survei Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, bahwa angka kemiskinan di daerah tertinggal sangat signifikan dibandingkan dengan daerah yang non tertinggal. Hal tersebut yang mendorong dilakukannya penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini adalah sebuah hasil penelitian yang menggunakan metode induktif melalui pendekatan kualitatif. Data yang

diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi serta diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*). Peserta FGD terdiri dari Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten, pihak Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan dan tokoh masyarakat. Informan yang digunakan sebagai sumber data diarahkan kepada tokoh masyarakat serta petugas daerah. Data-data lapangan merupakan data primer kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencari pola dan model yang pada akhirnya ditemukan permasalahan sosial yang terdapat di daerah penelitian serta sumber daya yang tersedia. Gambaran data diolah dan disajikan secara deskriptif.

DAERAH TERTINGGAL, SUMBER DAYA DAN PERMASALAHAN SOSIAL

1. Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal secara umum dipahami sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (Saifullah, 2006 dalam Muhtar dkk, 2010). Pengertian ini kemudian diperjelas secara detil melalui Badan Pengembangan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), bahwa suatu daerah yang dikatakan tertinggal, karena (a) secara geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi; (b) dari sisi sumber daya alam, tidak memiliki potensi, atau memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat di eksploitasi, dan daerah

tertinggal akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan; (c) dari sisi sumber daya manusia, umumnya masyarakat di daerah tertinggal, tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilannya relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang; (d) keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; (e) seringnya (suatu daerah) mengalami bencana alam dan konflik sosial yang berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi; dan (f) suatu daerah menjadi tertinggal, disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat, seperti: kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan, (Muhtar dkk, 2010).

2. Sumber Daya

Setiap daerah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi. Sumber daya memiliki nilai-nilai tertentu yang dianggap mampu memberikan kekuatan, baik secara moril maupun materiil untuk meningkatkan atau pengembangan satu wilayah, dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat serta penurunan permasalahan sosial. Dikemukakan oleh Manan (1978), bahwa semua sumber daya baik alam, manusia, sosial dan ekonomi yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan salah satu dari sumber daya yang

sangat dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut Soerianegara (1977) bahwa hutan, tanah, air, tanaman pertanian, padang rumput, dan populasi ikan merupakan beberapa contoh sumber daya alam yang dapat dipulihkan (*renewable resources*). Selanjutnya dikatakan bahwa sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu Negara memiliki kaitan yang erat, dimana kekayaan sumber daya alam secara teoritis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat.

b. Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dipahami sebagai orang-orang yang memiliki potensi dan mampu serta mau diperankan atau memerankan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungannya. Di masyarakat luas biasa disebut sebagai para tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pendidikan, tokoh remaja dan lain-lain, baik yang terdapat dalam satu organisasi maupun individu. Pengertian sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM dipahami sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi.

c. Sumber Daya Sosial

Sumber daya sosial dapat dipahami sebagai modal sosial yang ada pada

masyarakat maupun dalam keluarga. Tersedianya sumber daya sosial atau modal sosial baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga, merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjamin terbangunnya kondisi harmonis untuk membentuk masyarakat maupun keluarga yang mampu berdiri sendiri, dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada lingkungan sekitarnya. Seperti yang dikatakan dalam sebuah tulisan *Memahami Modal Sosial Dalam Pembangunan Pertanian*, yang diakses melalui internet, bahwa Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesalingpercayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Rahardjo (2010) mengupas pendapat Durkheim, yang menyebut istilah “modal sosial” untuk menyatakan ikatan sosial antar manusia di dalam sebuah masyarakat sangat penting untuk membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan bermasyarakat. Ia merupakan sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan hidup bersama yang tidak mungkin dicapai secara personal. Modal sosial dikatakan Durkheim merupakan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis, hanya bisa dicapai manakala antarwarga masyarakat itu saling berhubungan dengan baik melalui jaringan dan kesamaan nilai yang tumbuh di masyarakat itu dengan lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan yang ada. Nilai-nilai itu terus dijaga sebagai kekuatan yang mengikat, sehingga menjadi

kekuatan tersendiri yang bermanfaat tidak saja untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, tetapi juga untuk menangkis berbagai upaya yang mengancam kohesivitas mereka.

Sjafari (2014) mengatakan ketersediaan sumber daya sosial berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar keluarga yang mampu memberikan dukungan dalam memperkuat sistem sosial terhadap keluarga yaitu tingkat kepercayaan antar keluarga, dan intensitas kegiatan gotong royong. Sumber daya sosial terdiri dari tingkat kepercayaan antar keluarga, kerjasama antar keluarga, dan intensitas kegiatan gotong royong bagi keluarga miskin merupakan sebuah modal sosial yang masih berkembang di perkotaan.

Sumber daya sosial dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan, bila dilandasi dengan asas profesionalisme. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya sosial yang ada pada keluarga, akan memberikan nilai lebih, jika mendapatkan bimbingan dari yang berkompeten untuk memberikan bimbingan terhadap keluarga (Kartasmita, 1997).

Seperti yang dikatakan Sjafari (2014) bahwa kondisi riil menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya sosial keluarga miskin di perkotaan masih perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan. Secara umum ketersediaan sumber daya sosial pada keluarga miskin di perkotaan, baik kota besar maupun kota sedang tidak terdapat perbedaan yang mendasar, secara umum yang terjadi di perkotaan menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya sosialnya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Merangkum beberapa pendapat tersebut maka

sumber daya sosial sebagai Modal sosial dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang menjadi dasar atau yang mengarahkan aktivitas manusia sebagai kelompok sosial untuk saling berfungsi satu sama lain dan menjadi acuan untuk bertindak serta berstrategi dalam menghadapi persoalan yang datang ke masyarakat. Dapat dikatakan bahwa modal sosial adalah sebuah pranata sosial yang digunakan sebagai acuan dalam menghadapi masalah sosial yang tentunya bersumber dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya sosial/modal sosial yang ada di masyarakat maupun dalam keluarga, akan lebih memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai sosial ekonomi keluarga, jika ada intervensi dari pihak-pihak yang berkompetens dalam bidangnya.

d. Sumber Daya Ekonomi

Ketersediaan sumber daya ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung terbentuknya keluarga yang mandiri, karena sumber daya ekonomi mencakup berbagai sumber yang ada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sjaafari (2014) mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya ekonomi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar keluarga yang mampu memberikan dukungan ekonomi terhadap keluarga antara lain ketersediaan modal ekonomi, keikutsertaan dalam pelatihan keterampilan berusaha, tingkat penyerapan informasi, serta bantuan dari pihak luar. Sedangkan secara umum Sumber Daya Ekonomi adalah segala sumber daya dimiliki berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu yang berasal dari

sumber daya alam (SDA) maupun dari sumber daya manusia (SDM) yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan (*benefit*), serta dapat diolah sebagai modal dasar dalam pembangunan ekonomi. (Arga, 2012) bahwa sumber daya ekonomi dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, wujudnya berupa barang atau jasa. Sumber daya ekonomi dibagi menjadi empat macam, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya kewirausahaan serta sumber daya modal (*answers, yahoo.com, 2014*).

3. Permasalahan Sosial

Permasalahan sosial merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat yang belum dapat ditangani secara tuntas. Masalah sosial pada dasarnya adalah kesenjangan interpretasi dengan menggunakan pengetahuan budaya suatu masyarakat terhadap kenyataan sosial yang melingkupinya, sehingga masalah sosial dapat dimaknai sebagai perbedaan interpretasi antar kelompok sosial terhadap gejala yang ada yang pada dasarnya tidak mampu dipahami secara baik oleh sekelompok sosial masyarakat sehingga menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial. Permasalahan sosial dapat terjadi di setiap wilayah, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dapat dilihat pada sistem sosial yang mengandung benih ketimpangan kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Keterbatasan aspek produksi dapat juga menyebabkan kemiskinan, kemiskinan dapat menyebabkan kurang pangan dan gizi yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan fisik dan mental. Sedangkan faktor eksternal termasuk intervensi pemerintah, seperti

program dari pemerintah yang pada awalnya bertujuan untuk pemecahan masalah, ternyata menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan/atau menimbulkan suatu jenis masalah yang sebelumnya tidak ada dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Patoameme sebagai salah satu desa tertinggal di Botumoitto merupakan pemekaran dari Desa Botumoitto, yakni sejak Tahun 2003, beberapa bulan sebelum pembentukan Kecamatan Botumito. Nama “Patoameme” berasal kata “*patok pohon meme*”, yakni sejenis pohon yang oleh leluhur mereka ditanam sepanjang pantai sebagai pelindung dari penglihatan bajak laut, sehingga terhindar dari serangan bajak laut.

Luas wilayah Desa Patoameme seluruhnya 63,490 Km², yang terdiri dari 4 (empat) dusun, yakni Lomuli (dusun I), Dusun Tuwodu (dusun II), Dusun Ba’ala (dusun III), dan Dusun Milango (dusun IV). Dusun yang terluas adalah Ba’ala dan terkecil Dusun Lomuli. Di Desa Patoameme ini hanya mengenal kewilayahan/ lingkungan model “dusun”, tidak ada lingkungan RT atau RW.

Kondisi wilayah Patoameme terdiri dari wilayah perbukitan dan wilayah pantai (yakni Dusun Milango). Perbukitan ini sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian. Tampak tidak ada tanaman pelindung atau untuk penghijauan wilayah. Oleh karena itu apabila tanaman ladang sudah dipanen kondisi perbukitan tampak gundul.

Jarak Desa Patoameme dengan ibukota kabupaten (kota Tilamuta) sekitar 15 Km dengan waktu tempuh selama 30 - 40 menit. Jarak desa ke Ibukota Provinsi Gorontalo adalah sekitar 90 Km dengan waktu yang dibutuhkan

kurang lebih 190 menit (2,5 jam). Patoameme terletak pada jalur jalan Trans Sulawesi, namun transportasi umum antar desa, kecamatan dan ke ibukota kabupaten masih sangat terbatas. Transportasi yang ada saat ini banyak mengandalkan pada angkutan jenis “Bentor” (becak motor) dan angkutan antar kabupaten yang frekuensinya kecil, dan waktu operasi hanya pagi hingga sore hari. Di luar waktu itu penduduk harus menggunakan sepeda motor. Pengalaman peneliti untuk menunggu “bentor” pada saat mulai sekitar jam 18.00 hingga jam 20.00 bisa memerlukan sekitar 10 hingga 15 menit tergantung keberuntungan. Biaya bentor ini untuk jarak sekitar 3 km sebesar Rp. 2.000,- per orang (kapasitas penumpang 2 orang). Untuk sampai ke Pasar Tilamuta (ibukota kabupaten) memerlukan biaya sekitar Rp. 7.500,- per orang sekali jalan. Biaya ini hampir sama dengan biaya angkutan antar kabupaten (sekitar 5 – 6 ribu rupiah).

Jumlah penduduk Desa Patoameme tahun 2011, seluruhnya 2.338 jiwa yang terdiri dari 1.192 laki-laki dan 1.146 perempuan, dengan kepadatan penduduk 37 orang/Km dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 645 KK. Jumlah KK terbanyak di Dusun Milango (219 KK) dan terkecil di Dusun Tuwodu (132 KK).

Tingkat pendidikan penduduk Desa Patoameme sebagian besar masih pada tingkat SD dan hanya sebagian kecil berpendidikan SLTP dan SLTA. Adapula golongan kecil penduduk yang masih buta aksara (hanya bisa menulis dan membaca huruf Arab), yakni terutama pada golongan usia tua (60 tahun ke atas).

Untuk mendukung pelayanan pendidikan penduduk di Desa Patoameme, saat ini telah memiliki satu buah TK, 2 SD (negeri dan ibtidaiyah) dan satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta. dilengkapi dengan beberapa

tenaga pengajar, baik tenaga honorer maupun PNS. Sekolah lainnya seperti SMP dan SMU ada di desa tetangga. Sebuah SMU dan 1 SMP negeri letaknya tidak terlalu jauh dari pusat Desa Patoameme.

Penduduk Patoameme adalah penganut Islam. Meskipun ada upacara-upacara adat, namun dalam hal perkawinan, pembagian waris, dan lain-lain mendasarkan pada kaidah Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan sistem kekerabatan, masyarakat Patoameme menganut jalur patriarhat (jalur laki-laki).

Pada masyarakat Patoameme meskipun mengenal kekerabatan model “marga”, tetapi tidak ada aturan ketat mengenai kemargaan, tidak seperti misalnya pada masyarakat Tapanuli yang melarang pernikahan dalam satu marga. Pernikahan bisa terjadi dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan ketentuan Agama Islam.

Sumber Daya di Desa Patoameme

1. Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam seperti bahan-bahan tambang atau hasil hutan tidak dimiliki oleh Desa Patoameme. Sumber andalan yang ada saat ini dari kelapa dan hasil kebun berupa jagung. Hampir seluruh tanah pertanian di Patoameme merupakan tanah tadah hujan, oleh karena itu kegiatan pertanian sangat tergantung dengan kondisi musim. Pohon kelapa yang jumlahnya berlimpah mempunyai andil yang cukup besar bagi ekonomi penduduk. Harga untuk satu batang pohon kelapa yang produktif bisa mencapai 400 ribu rupiah (untuk kualitas terbaik); untuk kualitas terendah mencapai 150 ribu rupiah per batang.

Sumber daya laut Patoameme sebenarnya cukup potensial. Banyak jenis ikan yang merupakan komoditas yang berharga, misalnya ikan tuna dan cakalang. Namun belum mampu

digali secara optimal oleh penduduk setempat. Hal ini mengingat penduduk pesisir Patoameme merupakan nelayan kecil dengan peralatan dan teknologi yang masih konvensional.

2. Sumberdaya Manusia

Meskipun sarana pendidikan sampai dengan tingkat lanjutan cukup memadai. Namun kondisi yang ada saat ini sebagian besar penduduk masih berada pada golongan pendidikan rendah (SD). Di kemudian hari dengan adanya dukungan sarana pendidikan yang ada diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

Keterampilan yang dimiliki oleh penduduk saat ini adalah menjahit, membuat atap dari daun kelapa/rumbia, membuat minyak kelapa, membuat anyaman tikar, dan menangkap ikan. Keterampilan yang ada saat ini belum banyak memberikan kontribusi yang memadai bagi peningkatan penghasilan. Hal ini disamping masalah pemasaran juga kemampuan memproduksi yang masih rendah (misalnya untuk satu lembar tikar membutuhkan waktu 3 hari). Khusus untuk tikar ini bahan baku sepenuhnya didapat dari luar desa sehingga membutuhkan biaya modal yang cukup besar. Sedangkan atap dari daun pohon kelapa sudah mulai banyak ditinggalkan orang. Dalam hal kesehatan, menurut keterangan warga banyak penduduk mudah terkena dan tertular penyakit kulit, terutama di wilayah pesisir. Hal ini bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber air bersih dan terbatasnya sarana MCK. Banyak warga tidak mempunyai MCK sendiri, terutama pada mereka golongan tidak mampu. Untuk layanan kesehatan di Desa Patoameme saat ini memanfaatkan Puskesmas Kecamatan di desa induk Batumoito, dan Puskesmas Pembantu (Pustu kecamatan) di desa Tutulo. Sedangkan untuk layanan Puskesmas, terutama untuk layanan bidan, ada sebuah Puskesmas yang

letaknya berdampingan dengan kantor desa. Saat ini masyarakat masih memanfaatkan layanan dukun untuk melahirkan bayi. Namun layanan ini wajib dilakukan bersama dengan Bidan setempat.

Jumlah tenaga medis yang mendukung kebutuhan desa Patoameme, termasuk desa yang berdekatan (Botumoito dan Tutulo) terdiri dari seorang dokter dan beberapa perawat di Puskesmas Kecamatan, seorang perawat di Puskesmas Pembantu. Sedangkan untuk Desa Patoameme sendiri tenaga medis jumlahnya masih sangat terbataas. Saat ini hanya ada sebuah Pusekesdes dengan seorang bidan desa dengan 4 dukun bayi.

Terkait dengan kesehatan penduduk, masih ada warga miskin yang belum mempunyai kartu Jamkesmas, dan hanya menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang terbatas keberlakuannya sampai rumah sakit kabupaten.

3. Sumberdaya Sosial

Seluruh penduduk Desa Patoameme adalah penganut muslim. Meskipun demikian dalam hal-hal tertentu masih diwarnai upacara-upacara adat. Misalnya dalam kejadian warga meninggal dunia (kedukaan), ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan sampai 100 hari. Pada saat peringatan 40 hari biasanya dilakukan pula pemasangan batu nisan. Sebelum ada nisan, saat penguburan ditandai dengan batang jarak (oleh penduduk setempat disebut "*balacae*"). Nisan yang akan dipasang dibawa ke makam dalam kondisi ditutup dengan pakaian orang yang meninggal dan diberi hiasan kopiyah. Upacara pemasangan nisan ini dipimpin oleh seorang pemangku adat. Sebagai tanda untuk membedakan makam laki-laki atau perempuan, untuk makam laki-laki satu buah, dan untuk perempuan dua buah. Warga yang hadir dalam peringatan 40 hari diberikan bungkus kue dan uang logam 500 rupiah s/d 1000 rupiah;

bungkus ini mereka sebut "*bako hati*", kebiasaan ini masih berlangsung hingga kini. Mengenai tempat pemakaman, sampai saat ini di Patoameme belum ada pemakaman umum; masyarakat melakukan penguburan jenazah di tanah milik keluarga mereka.

Dalam masalah kedukaan tersebut di atas, sudah ada perkumpulan kematian yang besarnya iuran untuk tiap keluarga tergantung dari jumlah anggota keluarganya. Iuran ini dikeluarkan dan diberikan pada saat melayat ke keluarga yang mengalami kedukaan. Tidak semua lingkungan atau dusun mempunyai perkumpulan kematian. Setiap keluarga bebas memilih ikut perkumpulan mana yang disukai.

Adat yang terkait misalnya dengan kehidupan sehari-hari dan kesenian tradisional, menurut warga sudah mulai banyak ditinggalkan. Saat ini upaya pelestarian adat budaya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten. Upaya pelestarian adat kebiasaan warga Patoameme dan warga Boalemo pada umumnya, oleh Pemda Kabupaten Boalemo telah membentuk Perangkat Adat pada level kecamatan berdasarkan SK Bupati Boalemo nomor 115 Tahun 2011. Dalam SK Bupati tersebut telah ditetapkan 5 kelompok personil Perangkat Adat Kecamatan, yakni:

- 1) *Buwatulo Syara'a*, yang membidangi keagamaan, dakwah dan urusan-urusan yang berkaitan dengan penegakan syariah Islam.
- 2) *Buwatulo Bubato*, yang membidangi kegiatan-kegiatan adat, seperti penyambutan tamu, acara pernikahan dan acara adat lainnya. Dalam kegiatan ini pemangku adat menggunakan seperangkat pakaian adat menurut aturan yang ada
- 3) *Buwatulo Bala*, yang membidangi masalah-masalah pengawalan dalam acara adat. Biasanya mereka menggunakan pakaian

serba hitam atau putih hitam lengkap dengan senjata sejenis keris

- 4) *Buwatulo Da-dalo*, yang membidangi urusan penyampaian berita kedukaan terutama bila ada petinggi atau mantan petinggi yang meninggal dunia. Pemangku adat ini juga bisa berperan dalam pengumpulan dana yang mereka sebut "*Pulaihe*".
- 5) *Tolimato*, yang bertugas mengarahkan dan mengatur jalannya upacara adat.

Kegiatan keagamaan yang ada di Patoameme tampaknya masih didominasi dalam bentuk kegiatan ritual keagamaan, seperti kegiatan pengajian dan majelis taklim. Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan untuk membantu sesama, misalnya dalam bentuk pelayanan sosial, santunan atau bantuan kepada keluarga tidak mampu, atau bentuk *kegiatan sosial keagamaan* lainnya, belum tampak dalam kehidupan masyarakat Patoameme. Kegiatan sosial masih terbatas dalam bentuk pemberian zakat fitrah (saat hari Raya Idul Fitri) dan pembagian daging kurban saat (Hari Raya Idul Adha). Dapat dikatakan bahwa dalam hubungan antar manusia (*hablumminannas*), terutama kepedulian untuk membantu sesama masih terbatas.

Belum ada upaya penghimpunan dana sosial dari warga mampu di Patoameme. Menurut salah seorang kepala dusun persoalan penggalangan dana ini antara lain terkendala pada tidak sebandingnya jumlah keluarga mampu dengan keluarga tidak mampu (di satu dusun jumlah warga kurang mampu jauh lebih besar). Terkait dengan kondisi itu, maka saat ini belum ada lembaga pelayanan sosial oleh masyarakat sendiri. Seluruh kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial masih sangat tergantung dari bantuan pemerintah.

4. Sumberdaya Ekonomi

Patoameme sebagai desa pemekaran dari Botumoito, kondisi perkembangan wilayahnya

masih rendah dibandingkan desa induk. Meskipun Desa Patoameme ini menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Botumoito, namun jumlah sarana toko dan warung masih terbatas. Warung-warung makan hanya ada satu buah (kantin kecamatan), warung makan lainnya berada di wilayah Desa Botumoito yang berjarak sekitar 2 – 3 km dari kantor kecamatan. Begitu pula dengan warung-warung sembako, jumlah maupun variasi barangnya sangat terbatas. Guna pemenuhan kebutuhan yang lebih lengkap lagi biasanya didapat di Pasar Tilamuta, yang memerlukan biaya sekitar 5000 ribu rupiah sekali jalan.

Sesuai dengan kondisi alam Patoameme, pekerjaan/mata pencaharian utama penduduk pada umumnya bidang pertanian (yakni petani ladang) dan kebun (terutama kelapa). Sebagian penduduk lainnya di wilayah pesisir sebagai nelayan. Pertanian tanaman jagung merupakan komoditas andalan dari Provinsi Gorontalo. Namun tanaman jagung ini masih terkendala dengan kondisi tanah, musim dan kemampuan petani merawat tanaman, sehingga produksinya sering kurang maksimal.

Produksi jagung biasanya sebagian mereka gunakan untuk konsumsi keluarga dan sebagian lainnya untuk di jual. Jagung ini pada mulanya merupakan makanan pokok penduduk Gorontalo. Sesuai dengan perkembangan jaman, saat ini meskipun sebagian besar sudah mengkonsumsi beras, namun adakalanya dalam konsumsi sehari-hari masih dicampur dengan jagung.

Dalam hal penanaman dan produksi kelapa, tidak semua penduduk mempunyai lahan dan mempunyai pohon kelapa sendiri. Si pemilik kebun/tanah belum tentu si pemilik pohon, sebaliknya si pemilik pohon belum tentu si pemilik tanah. Penanaman kelapa pada sebagian atau seluruh tanah si pemilik biasa dilakukan atas dasar pembagian pohon, yakni

dengan sistem pembagian 1/3 untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk penanam pohon. Pohon kelapa yang merupakan hak milik si penanam mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas tergantung si kemauan penanam/pemilik pohon. Pemilik pohon tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap pemilik tanah, sementara itu pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak (PBB). Dalam kondisi yang demikian tampaknya yang paling diuntungkan adalah si pemilik pohon.

Di sektor perikanan tampaknya (wilayah pantai Dusun Milango) masih belum mampu memberikan peningkatan ekonomi yang cukup signifikan bagi penduduk. Penggalan hasil laut belum mampu dilakukan penduduk secara optimal. Hal ini antara lain terkendala oleh peralatan dan teknologi yang masih konvensional. Oleh karena itu dari hasil observasi dan catatan kepala dusun nelayan, jumlah keluarga yang tergolong kurang mampu cukup besar (lebih dari 50%). Penduduk nelayan yang mampu memberikan hasil cukup signifikan (menurut penuturan seorang isteri nelayan), adalah yang bekerja di perahu-perahu ikan milik perusahaan dalam negeri maupun asing (seperti Jepang dan Korea). Namun menurut mereka, bahwa para nelayan umumnya hidup “boros”, sehingga sering hasil mereka kurang bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Mereka sering tidak mampu manage/mengatur dan merencanakan keuangan keluarga secara baik. Sementara itu fluktuasi penghasilan mereka relatif cukup tinggi tergantung pada kondisi musim dan cuaca.

Permasalahan Sosial Desa Patoameme

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan hasil identifikasi bersama para kepala dusun di Desa Patoameme, dan hasil studi dokumentasi, terdapat 8 (delapan)

jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS di Desa Patoameme. Dari PMKS tersebut yang jumlahnya cukup menonjol adalah masalah kemiskinan yang jumlah 332 KK, dan Rumah Tidak Layak Huni berjumlah 200 unit. Masalah lain yang berkaitan dengan kemiskinan adalah keterlantaran anak, lanjut usia dan putus sekolah, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel: 2. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa Patoameme

No.	Jenis PMKS	Jumlah (Orang)
1.	Anak Balita Terlantar	2
2.	Anak Terlantar	20
3.	Anak Putus sekolah	36
4.	Lanjut Usia Terlantar	37
5.	Penyandang Cacat	23
6.	Keluarga Fakir Miskin	332
7.	Kel.Rumah Tidak Layak Huni	200
8.	Keluarga Rentan	9

Sumber: Hasil Penelitian

Penetapan PMKS tersebut berdasarkan kriteria lokal yang telah disepakati oleh warga masyarakat para ketua dusun seperti berikut:

- Anak Balita Terlantar*, yaitu anak usia kurang dari 5 tahun, kondisi kesehatan rendah, kurang terurus, berada dalam keluarga janda miskin
- Anak Terlantar*: yaitu anak usia 5-18 tahun, Kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kurang terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan kesehatan, kurang perhatian orangtua, berada dalam keluarga miskin
- Anak Putus Sekolah*, yaitu anak usia sekolah 6-18 tahun, putus sekolah SD, SLP dan SLA karena tidak mampu mengikuti pelajaran atau keluarga tidak mampu membiayai sekolah anak.
- Lanjut Usia Terlantar*, yaitu penduduk usia 60 tahun keatas, tinggal sendiri atau dengan

keluarga, tidak mampu bekerja, tidak terurus, dan sakit-sakitan.

- e. *Penyandang Cacat*, yaitu anak atau dewasa yang mengalami kelainan fisik, atau mental, atau pancaindra, dan atau cacat ganda, sehingga mengalami kesulitan atau tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Penyandang cacat ini terdiri dari Tuna Netra, Cacat Tubuh, Cacat Mental Grahita, Tuna rungu Wicara, dan Cacat Ganda.
- f. *Keluarga Fakir Miskin*, yaitu keluarga SDM rendah, penghasilan tidak tetap, tidak memiliki lahan dan sarana berusaha, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, umumnya tinggal di rumah tidak layak huni.
- g. *Rumah Tidak Layak Huni*, yaitu kualitas bangunan rendah (dinding anyaman bambu, atap rumbia/daun kelapa, lantai tanah), jumlah kamar sangat terbatas, dan tidak mempunyai MCK serta sarana air bersih yang memadai.
- h. *Keluarga Rentan*, yaitu keluarga muda usia 20-30 tahun, usia pernikahan kurang dari 5 tahun, tidak mampu secara ekonomi, KK tidak memiliki pekerjaan tetap

Masalah bencana alam, meskipun wilayah pesisir Patoameme sering terkena banjir, namun belum merupakan masalah serius. Hal ini di samping lamanya genangan banjir yang relatif singkat (hanya beberapa jam), juga belum menimbulkan kerugian yang serius. Warga yang terkena banjir, jika terpaksa masih mengungsi di tempat kerabat.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan pilar-pilar partisipan bidang kesejahteraan sosial, seperti organisasi sosial desa dan Karang Taruna tidak terlihat keberadaannya. Demikian pula dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau relawan sosial. Saat ini yang ada adalah anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) sejumlah 4 (empat) orang

yang sudah mengikuti pelatihan.

2. Permasalahan sosial lain

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yakni adanya kebiasaan masyarakat menanam dan membagi kepemilikan pohon kelapa pada masyarakat Desa Patoameme. Pada kebiasaan tersebut pemilik pohon tidak mempunyai tanggungan apapun kecuali pembagian persentase jumlah pohon yang ditanam. Sementara itu si pemilik tanah akan menanggung beban pajak PBB selama tanah tersebut menjadi miliknya. Si penanam pohon atau pemilik pohon bisa menikmati hasil selama pohon kelapa masih produktif. Tidak ada ketetapan jangka waktu kapan hak penggunaan tanah tersebut berhenti. Bahkan si pemilik pohon setiap saat dapat memindahtangankan (menjual) pohonya kepada orang lain. Si pemilik pohon dapat melanjutkan hak pemilikan dan memetik hasilnya. Dalam kondisi yang demikian, untuk jangka panjang bisa menjadi ancaman pada pemiskinan si pemilik tanah. Mereka mungkin hanya memiliki sedikit pohon kelapa (meskipun tanah luas), atau hanya menjadi buruh pemetik atau pengupas kelapa di kebun sendiri. Pada saat ini belum terlihat nyata dampak negatifnya, namun dikemudian hari saat tanah/lahan kebun mulai sulit didapat, akan berpotensi untuk terjadinya konflik horisontal.

Kemudian, pada umumnya masyarakat berperilaku boros dalam penggunaan hasil. Sebagaimana ciri masyarakat nelayan umumnya, pada masyarakat nelayan Patoameme masih ada kebiasaan menggunakan penghasilan tanpa perencanaan; sementara itu fluktuasi penghasilan di sektor nelayan ini cukup tinggi. Pada saat memperoleh hasil yang cukup besar, masyarakat nelayan cenderung menggunakan penghasilan pada pengeluaran yang tidak terencana dengan baik. Oleh karena itu, masalah kemiskinan sering sulit terlepas dari kehidupan mereka, terutama

terkait dengan masalah manajemen keuangan keluarga. Menurut Ketua Dusun nelayan, persentase keluarga miskin di wilayahnya mencapai lebih dari 60 persen. Hal ini terjadi karena umumnya mereka belum mampu menyediakan sarana peralatan penangkapan ikan yang cukup memadai baik dari segi jumlah, kualitas, maupun teknologinya.

Kebiasaan lain, khususnya pada penduduk asli, sebagai peninggalan leluhur kebiasaan bergantung pada penanaman dan penghasilan dari tanaman keras. Tanaman keras pada umumnya tidak memerlukan perawatan intensif seperti tanaman pertanian. Kondisi yang demikian menurut beberapa warga yang ditemui, menjadikan keuletan penduduk asli untuk bertani masih jauh lebih rendah dibanding penduduk pendatang. Warga lain mengatakan bahwa mereka terpaksa tidak dapat merawat pertanian dengan baik, karena harus melakukan aktivitas lain dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama belum panen. Hal yang demikian menjadikan produktivitas pertanian mereka menjadi kurang optimal.

Masalah pendidikan terkait kualitas SDM rendah masih merupakan permasalahan yang dihadapi penduduk Patoameme. Kurangnya kemampuan orang tua murid kategori Rumah Tangga Miskin untuk membiayai pendidikan anaknya, mendorong terjadinya anak putus sekolah (saat ini tercatat 36 anak putus sekolah). Keberadaan Anak putus sekolah ini (menurut para kepala dusun) dapat mempengaruhi dan memicu penurunan semangat belajar/sekolah di kalangan anak-anak, sehingga bisa meningkatkan jumlah anak putus sekolah.

Pembangunan di Desa Patoameme

Program-program pembangunan fisik dan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah sejak tahun 2007 sudah masuk Desa Patoameme, seperti penampungan air bersih; pemrosesan

air minum isi ulang, perbaikan infrastruktur fisik desa, pembangunan tanggul untuk mencegah abrasi; program-program pemberdayaan masyarakat baik melalui modal bergulir maupun kelompok usaha bersama (KUBE), Raskin, dan BLT, serta program renovasi rumah tidak layak huni. Untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, dalam 3 tahun terakhir tercatat 33 rumah. Program penyediaan penampungan air bersih dari PAM, saat ini terkendala dalam penarikan iuran untuk pembayaran rekening. Program bidang pendidikan, berupa dana BOS dan beasiswa untuk anak keluarga miskin (tahun 2010 untuk 21 orang, dan tahun 2011 untuk 18 orang) sebesar 360 ribu/org. Oleh pihak sekolah, bantuan ini diberikan secara bergilir, diutamakan mereka yang berada pada kelas V dan VI. Bantuan dunia usaha 1 orang/tahun bagi anak yang berprestasi, diberikan persemester Rp.660.000,-.

Saat ini baru akan masuk program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas). Program ini akan menyediakan kebutuhan air bersih masyarakat dengan tarif yang relatif terjangkau. Menurut mereka, tiap keluarga sudah menyerahkan dana untuk uang muka sebesar Rp. 60.000,-/keluarga, yakni hampir sekitar 11 juta rupiah per desa.

Terkait dengan banyaknya program yang masuk, hasil wawancara dengan beberapa kepala dusun dan beberapa warga, mengandung kesan adanya ketergantungan mereka terhadap bantuan dari luar. Tampaknya dalam pelaksanaan program belum dapat membangkitkan partisipasi masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dan mengancam kesinambungan. Penilaian sementara dari warga terhadap program-program yang ada, menyebutkan bahwa program yang masuk sering kurang tepat sasaran.

KESIMPULAN

Gambaran secara umum keadaan Desa Patoameme dalam hal sumberdaya alam, manusia, sosial dan ekonomi pada dasarnya belumlah dikelola secara tepat dan didayagunakan secara maksimal dengan menggunakan modal sosial yang tersebar di masyarakat tersebut. Permasalahan sosial yang muncul di masyarakat akibat ketidakefektifan pemanfaatan modal sosial yang ada adalah masalah kemiskinan yang semakin tinggi dan sudah mengakibatkan persoalan lainnya seperti adanya keterlantaran balita, anak terlantar serta ketidak perdulian terhadap orang tua sehingga banyak orang usia lanjut yang terlantar. Selain persoalan sosial yang muncul yang sudah berdampak pada keadaan keterlantaran individu yang ada, juga adanya perilaku-prilaku yang tidak produktif dari anggota masyarakat serta sifat konsumerisme yang justru meningkat yang berakibat pada pemborosan dan disfungsi pada sosial sistem yang ada.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah Boalemo secara sinergi menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada:

1. Perubahan perilaku masyarakat.

Bentuk kegiatannya yaitu penyuluhan dan bimbingan sosial, yang diarahkan pada sikap dan perilaku hidup produktif, tidak boros, mendukung pendidikan anak, tidak bergantung dengan program pemerintah, partisipasi dalam pembangunan desa dan memperkuat ketahanan sosial. Kemudian, bimbingan teknis yang utamanya terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang sumber daya alam, manusia, sosial dan ekonomi serta permasalahan sosial yang ada di

lingkungannya. Berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat ini, diperlukan pendamping sosial yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan masyarakat.

2. Pengembangan ekonomi masyarakat

Bentuk kegiatannya yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang difokuskan pada pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan ekonomi, dengan prinsip partisipasi. Berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat ini, diperlukan pelatih yang kompeten di bidang perkebunan dan perikanan laut, sehingga pengembangan ekonominya lebih diarahkan pada pembudidayaan kelapa dan perikanan laut. Berkaitan dengan ini, maka adaptasi teknologi tepat guna menjadi kebutuhan dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyadari bahwa naskah ini dapat diterbitkan berkat bantuan dari beberapa pihak dalam memberikan sumbangan pikiran dalam penulisan naskah ini. Dalam kesempatan ini saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan naskah ini sampai pada penerbitannya. Semoga naskah ini bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, UI-Press, Jakarta
- Arga E SMB. (2012). *Sumber Daya Ekonomi*, <http://boetarboetarzz.blogspot.com/2012/11/sumber-daya-ekonomi.html>, diakses tgl 17 November 2014.
- Anonim. (2014). "Definisi dan Pengertian Sumber Daya", <http://pengertian->

- definisi.blogspot.com/2012/02/definisi-dan-pengertian-sumber-daya.html, diakses tanggal 2 Mei 2014
- Badan Pusat Statistik. (2010). *“Boalemo Dalam Angka Tahun 2010”*, Boalemo: BPS Kabupaten Bualemo.
- Kartasamita, G. (1997). *Membangun Sumber Daya Sosial Profesional*, (<http://ginandjar.com/public/10MembangunSumberdaya.pdf>), diakses tanggal 17 November 2014
- Muhtar, dkk. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal: Identifikasi Kebutuhan, Sumberdaya, dan Permasalahan Masyarakat Desa Jambu & Engkangin- Kalimantan Barat Serta Desa Sendangmulyo & Desa Mlatirejo*, Jakarta: P3KS Pres
- Priyono, O.S. & Pranarka, A.M.W. (1966). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Raharjo, M. (2010). *Mengenal Modal Sosial* <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/204-mengenal-modal-sosial.html>, diakses tanggal 19 November 2014
- Rudito, B. & Melia, F. (2008). *Social Mapping- Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komunitas*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Sjafari A. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Fisip Untirta Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Zaini, H.F., (2010), *“Mengejar Kemajuan, Mengentaskan Ketertinggalan”*, Jakarta: *Tempo*, 22/12/2010.
- http://sulsel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=691:memahami-modal-sosial-dalam-pembangunan-pertanian&catid=158:buletin-nomor-5-tahun-2011&Itemid=257, Memahami Modal Sosial Dalam Pembangunan Pertanian, diakses tanggal 18 november 2014
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia; Sumber daya manusia, diakses 2 Mei 2014.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam#Pemanfaatan_sumber_daya_alam). Sumber Daya Alam, diakses tanggal 17 November 2014
- <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120921050313AAvjgnP>. Pengertian Sumber Daya Ekonomi , diakses Tanggal 17 November 2014.